

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik

Guna Mencapai Gelar Sarjana S.IP Pada

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh:

MARE GOMBO

NIM 2016-10-094

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KAMPUNG
AIR GARAM DISTRIK BUGI KABUPATEN JAYA**

Diusulkan oleh ,

NAMA : MARE GOMBO

NIM : 2016-10-094

PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

WAKTU PENULISAN : 2 Bulan

Telah diperiksa dan disetujui

Pada Tanggal : Februari 2021

Dan siap untuk diseminarkan

Pembimbing I

Pembimbing II

SITI KHIKMATUL RIZQI,S.IP,M.Si

NIDN. 1201037702

RIANIK THOMAS,SE,M.Si

NIDN. 1415097901

Mengetahui :

Ketua Program Studi,

SITI KHIKMATUL RIZQI,S.IP,M.Si

NIDN. 1201037702

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KAMPUNG
AIR GARAM DISTRIK BUGI KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Telah Dipertahankan Skripsi Di Depan Panitia Ujian Skripsi

Pada Hari Tanggal 2020

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua,

Sekretaris

Anggota,

Anggota,

Mengetahui,

Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

DR. H.RUDIHARTONO ISMAIL M,Pd
NIP. 197004081997021002

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena kebesaran dan kuasa-Nya serta rahmat yang berlimpah sehingga skripsi ini dapat disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan pada Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan apabila dilihat dari metode, substansi maupun analisisnya. Walaupun demikian, karya ilmiah ini adalah merupakan hasil yang maksimal dari penulis. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kontribusi yang dapat berupa sumbangan pikiran, koreksi ataupun kritikan yang bersifat konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini secara khusus penulis dengan tulus hati menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak **DR. H. Rudi Hartono Ismail, M.Pd** selaku Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan tinggi.
2. Ibu Siti Khikmatul Rizqi, S.IP, M.Si pembimbing I dan Ibu Hasriani Muslim, S.Pd, M.Pd selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi.
3. Ibu Siti Khikmatul Rizqi, S.IP, M.Si sebagai Ketua Program Studi
4. Ibu Dra. Telly Nancy Silooy, M.Si selaku Dosen Wali
5. Seluruh Dosen dan Staf Unaim Amal Ilmiah Yapis Wamena yang telah banyak memberikan jasa dan bantuannya kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Bapak **Ogingga Gombo** selaku Kepala Kampung Air Garam Distrik Bugi dan seluruh Aparat telah memberikan ijin dan rekomendasi untuk melaksanakan penelitian.

7. Kedua Orang tuaku **Bapak Kelait Gombo** dan **Ibu Pataodek Kenelak** beserta saudara/Pernus Gombo dan **Beliana Gombo** yang tiada henti-hentinya mendukung dalam doa.
8. Istri Terkasih Gemina Kenelak dan Putra Putri tersayang Aniel Gombo dan **Kepin Gombo** serta **Marsel Gombo** yang selalu mendukung dan memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016/2017 atas kebersamaannya selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
10. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan rela membantu penulis baik selama menekuni studi maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan, dimana masih jauh dari suatu karya ilmiah yang baik dan sempurna. Oleh sebab itu atas segala kekurangannya maka penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penulisan ini.

Semoga semua amal bhakti yang diberikan kepada penulis kiranya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga skripsi ini juga bermanfaat di hati pembaca.

Wamena, Januari 2021

P e n u l i s,

Mare Gombo

NIM. 201610094

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan pemerintahan yang baik menuju terciptanya kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia

Kebijakan pemerintah mengenai alokasi dana kampung sebagai salah satu upaya untuk pemberdayaan masyarakat kampung. Pendekatan pemberdayaan yang berorientasi proses diubah menjadi lebih berorientasi ke hasil sehingga terjadi perubahan orientasi pemberdayaan masyarakat yang menyebabkan ketidakberlanjutan program pemberdayaan masyarakat, Adanya upaya Generalisasi. Kondisi keragaman yang dimiliki oleh Negara Indonesia, mengandung potensi variasi lokal yang sangat besar. Oleh karena itu kebijakan pemberdayaan masyarakat harus mengikuti keragaman yang ada tersebut, karena dengan penyeragaman pelaksanaan program tidak akan menyentuh akar permasalahan dalam komunitas yang berbeda tersebut. Oleh karena itu pendekatan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan nilai-nilai dasar yang ada di masyarakat, karakter budaya serta struktur sosial masyarakat dan rentang birokrasi dan tingginya biaya operasional, permasalahan birokrasi yang tidak fleksibel dengan biaya operasional yang tinggi, selalu menjadi penghambat yang sering ditemui dalam pengalaman pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di Indonesia sampai saat ini. Orientasi petugas lapangan lebih kepada mengikuti peraturan dari pada menjawab kebutuhan lapangan. Hal ini akan sangat menghambat upaya pemberdayaan masyarakat serta Indikator yang tidak tepat dimana upaya pemberdayaan masyarakat yang selama ini dijalankan seringkali diukur dalam bentuk fisik, komoditas dengan berorientasi pada input dan kualitatif dari pada non-fisik dengan ukuran keberhasilan dari dampak dan proses. Hal ini mengabaikan pentingnya proses dalam upaya pemberdayaan karena yang paling penting adalah bagaimana menimbulkan

partisipasi, kesadaran akan nilai dan hukum dari masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang mampu dan mandiri.

Pendekatan penanggulangan yang dilaksanakan saat ini lebih diprioritaskan pada pemberdayaan dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat miskin dengan sebutan pembangunan manusia, sehingga mereka dapat terlepas dari kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini semua berkaitan dengan pembangunan kampung, maka perlu mendapat perhatian dan antipasi, diantaranya: terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia profesional; Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan kampung itu sendiri maupun sumber dana dari luar; Belum adanya peran secara efektif masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi; Belum adanya peraturan yang jelas dan tegas; Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat.

Pembangunan yang sudah menjangkau kampung saat ini menyebabkan kampung mengalami perubahan yang cukup besar. Beberapa aspek perubahan ini bahkan belum pernah terjadi sebelumnya sehingga telah mengubah wajah desa. Berbagai karakteristik yang ditemukan pada desa-kampung tradisional kini tidak ditemukan lagi melainkan digantikan dengan berbagai kemajua teknologi yang terasa asing dan merupakan hal baru bagi masyarakat kampung. Masyarakat kampung sebagai sebuah komunitas yang sedang mengalami perubahan karena pembangunan tidaklah lepas dari masalah. Beberapa diantara masalah-masalah tersebut adalah masalah lama yang belum terselesaikan atau masalah baru yang muncul akibat perubahan secara keseluruhan atau sebagai dampak negative dari pembangunan itu sendiri. Keadaan Kampung di Daerah Papua tidak semua keadaan kampung yang dicita-citakan itu terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak sedikit desa-kampung yang taraf perkembangannya masih sangat jauh dari cita-cita masyarakat dan pemerintahnya. Keadaan seperti itulah yang disebut masalah-masalah di pedesaan

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Papua bertujuan untuk Mempercepat penanggulangan kemiskinan secara

berkesinambungan menuju kemandirian masyarakat dengan cara meningkatkan potensi dan kapasitas masyarakat serta kemampuan kelembagaan milik masyarakat untuk mewujudkan program pokok dari konsep pembangunan yang berpusatkan pada manusia yaitu : makanan dan gizi, kesehatan, pendidikan, ekonomi rakyat, kesetaraan gender dan infrastruktur. Bahkan masyarakat pun akan memiliki kesempatan lapangan pekerjaan dalam pelaksanaan program ini. Untuk itu pemerintah menurunkan program alokasi dana desa sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memecahkan persoalan terkait peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Dalam pelaksanaan program alokasi dana desa di Kampung Air Garam Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya sudah dimulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 ini yang direalisasikan melalui beberapa kegiatan seperti pembangunan jalan kampung, pembuatan Kakus atau bangunan MCK, bangunan Pustu dan saluran air bersih. Dan dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti penggunaan dana tahun 2019.

Namun dalam pelaksanaannya, belum dilaksanakan secara optimal, karena kurang adanya pertanggung jawaban kepada masyarakat, kurang adanya koordinasi yang baik antar pendamping dan pemerintah kampung serta distrik, kurang adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan di kampung dan aparat dalam pelaksanaan dana tersebut belum handal, serta sikap yang kurang terbuka dalam pertanggung jawaban pelaksanaan Alokasi dana desa dan keadilan yang belum merata.

Berdasarkan uraian dan pemikiran inilah sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KAMPUNG AIR GARAM DISTRIK BUGI KABUPATEN JAYAWIJAYA"**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis dibatasi permasalahan pada Implementasi Program Alokasi Dana Desa Di Kampung Air Garam Distrik Bugi Kabupaten

Jayawijaya aspek yang dibatasi sebagai berikut : Hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi dan Karakteristik dan Kapabilitas Agen Pelaksana dan Kondisi Lingkungan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kampung Air Garam Distrik Air Garam Kabupaten Jayawijaya?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Alokasi Dana Desa Di Kampung Air Garam Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Dengan demikian setelah mendapatkan dan memperoleh tujuan penelitian sebagaimana tercantum di atas, maka diharapkan penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Pemerintahan yaitu berkaitan dengan implementasi program Alokasi Dana Desa.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus masukan bagi Pemerintah Daerah Jayawijaya khususnya Pemerintah Kampung Air Garam Distrik Bugi dalam implementasi Program Alokasi Dana Desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Implementasi Program/Kebijakan Publik

Dalam kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu; menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu), Dengan demikian maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit Presiden (Solichin, 2008 : 64).

Implementasi memegang peranan yang sangat penting dalam kebijakan publik, karena suatu kebijakan tidak akan memiliki arti apa-apa jika tidak diimplementasikan Melalui implementasi kebijakan maka rencana-rencana atau program-program yang masih bersifat abstrak diusahakan perwujudannya menjadi kenyataan. Seperti yang dikemukakan Syauckani, dkk (2002 : 295) bahwa Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijaksanaan kepada masyarakat sehingga kebijaksanaan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Sementara itu Solichin (2008 : 65) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan.

Menurut Grindle dalam Solichin (2008 : 23) mengatakan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar bersangkutan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan, Oleh sebab itu tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji dalam Solichin (1981 : 32) dengan tegas mengatakan bahwa

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Menurut pendapat Webster dalam Putra (2001 : 56) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden). Pada sisi lain, Van Mater dan Van Horn dalam Winarno (1975 : 65) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan namun juga melingkupi tindakan-tindakan atau perilaku individu-individu dan kelompok pemerintah dan swasta serta badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan, akan tetapi juga mencermati berbagai kekuatan politik, sosial, ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian, implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat,

tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain. Meskipun kebijakan telah direkomendasikan oleh *policy makers* namun bukan jaminan bahwa kebijakan itu akan mudah dan pasti berhasil dalam implementasinya.

Menurut pendapat Solichin (2008 : 63) bahwa dalam implementasi program khususnya yang melibatkan banyak organisasi/instansi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang, yakni : 1) pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (*the center* atau pusat); 2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (*the periphery*); dan 3) actor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan yakni kelompok sasaran(target group).

Dilihat dari sudut pandang pusat, maka analisis implementasi kebijakan itu akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapat kepatuhan dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat tingkat yang lebih rendah / daerah dalam upaya mereka untuk memberikan pelayanan atau untuk mengubah perilaku masyarakat / kelompok sasaran dari program yang bersangkutan.

Berangkat dari beberapa konsep implementasi yang telah dijelaskan diatas, maka kajian implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut agar bisa mencapai sasaran.

Sementara itu Menurut Grindle (Solichin, 1990 : 59) proses implementasi kebijaksanaan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tugas-tugas dan sasaran tersebut.

Kebijakan publik dalam realisasinya perlu dianalisa secara cermat agar diketahui sampai berapa jauh memberikan manfaat bagi publik. Pengertian Analisa Publik menurut Willian Dunn (2003 : 198) adalah "Disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai pengkajian berbagai dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan".

Berhasil tidaknya suatu kebijakan dapat diketahui melalui evaluasi kebijakan dengan memiliki fungsi menurut William Dunn (2003 : 147) sebagai berikut.

- a. Memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
- b. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemikiran tujuan dan target.
- c. Memberi sumbangan pada aplikasi dan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, merupakan ukuran dalam penilaian kebijakan tersebut. Namun kebijakan publik apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn (Solichin 2008 : 62) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ini dalam 2 (dua) kategori, yaitu *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccesfull implementation* (implementasi yang tak berhasil).

Kegagalan kebijakan publik menurut Andrew Dunsire (Solichin, 2008 : 61) dinamakan sebagai *implementation gap*), yaitu suatu istilah yang dimaksudkannya untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa

yang disebut oleh Walter Williams (Solichin, 2008 : 61) sebagai *implementation capacity* dari organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan (dalam dokumen formal) dapat dicapai.

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan sasaran merupakan ukuran dalam penilaian kebijakan. Pengukuran dimaksud sebagaimana pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Winarno (2002: 156) adalah bahwa : Suatu kebijakan tentulah menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kegiatan kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dari sasaran tersebut.

Dalam menganalisa faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan kebijakan, penulis menggunakan teori yang disampaikan oleh G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli.

Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Subarsono (2008 : 147) juga menekankan bahwa Ada empat kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, Selanjutnya kedua ahli ini menegaskan bahwa kerangka konseptual ini dapat digunakan untuk analisis implementasi program-program pemerintah yang bersifat desentralistis antara lain:

1. Hubungan antar organisasi yakni menyangkut pola-pola hubungan yang terjadi dalam implementasi kebijakan yang meliputi; kejelasan dan konsistensi sasaran program, pembagian fungsi antar instansi yang pantas, standarisasi prosedur perencanaan, anggaran, implementasi dan evaluasi, konsistensi dan kualitas komunikasi dan efektivitas jejaring untuk mendukung program.

Menurut Winter dalam Peters B. Guy ad Jon Pierre (2003 : 207) bahwa salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan adalah perilaku hubungan antar organisasi yakni menyangkut koordinasi dan

hubungan kerjasama antar berbagai organisasi maupun antara organisasi dan individu dalam implementasi kebijakan. Hal ini dipertegas oleh Cheema dan Rondinelli dalam Dwiyanto (2009 ; 163), bahwa kerjasama inter organisasi menunjuk implementasi kebijakan banyak dipengaruhi oleh interaksi dan koordinasi dari banyak jenis dan level yang berbeda dari organisasi pemerintah. Kerjasama yang baik antar unit-unit pemerintah dalam mencapai tujuan kebijakan tergantung pada :

- a. Kejelasan dan konsistensi sasaran program, yaitu menunjuk adanya tujuan program yang jelas dan perintah ditangkap dengan benar oleh agen-agen pelaksana sehingga pelaksanaan aktivitas ditujukan untuk menunjang berkembangnya program.
 - b. Pembagian fungsi secara tepat pada agen-agen pelaksana didasarkan pada kapasitas dan sumberdaya.
 - c. Standarisasi pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan implementasi program sehingga dapat meminimalisir konflik interpretasi yang membuat program atau kebijakan sulit untuk dikoordinasi.
 - d. Konsistensi dan kualitas komunikasi antar unit-unit pemerintah yang bertujuan menjadikan unit-unit pemerintah mampu memahami aturan dan tugas untuk melengkapi aktivitas dalam pencapaian tujuan program.
 - e. Efektifitas jaringan yang ditujukan pada unit-unit desentralisasi administrasi untuk memastikan adanya interaksi antar unit-unit organisasi pelaksana dan aktivitas organisasi
2. Sumberdaya organisasi yakni berhubungan dengan struktur birokrasi dalam melaksanakan kebijakan yang meliputi Kontrol terhadap sumber dana; keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program; ketepatan alokasi dana; pendapatan yang cukup untuk pengeluaran; dukungan pemimpin politik pusat; dukungan pemimpin politik lokal dan komitmen birokrasi.

Menurut George Edward III dalam Winarno (2008 : 182) mengatakan bahwa walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, (2008 ; 159), mengatakan bahwa sumberdaya layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud mencakup dana atau perangsang(incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dengan demikian dana atau uang memegang pelaksanaan penting sebagai perangsang dalam melakukan suatu pekerjaan.

3. Karakteristik dan kapabilitas agen pelaksana yakni, menyangkut kemampuan dan karakter-karakter yang dimiliki oleh pelaksana dalam mengimplementasikan program, meliputi : Keterampilan teknis, manajerial petugas; kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol, & mengintegrasikan keputusan; dukungan dan sumberdaya politik instansi; sifat komunikasi internal; hubungan antara instansi dengan kelompok sasaran; hubungan antara instansi dengan pihak di luar & NGO; kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan; komitmen petugas terhadap program; kedudukan instansi dalam hirarki sistem administrasi.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Hal ini juga dipertegas oleh Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2008 : 125) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya sebuah kebijakan diimplementasikan tergantung dari karakteristik dan kapabilitas agen pelaksana yang merupakan fungsi dari

kemampuan pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Lanjutnya, kemampuan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mungkin dihambat oleh faktor-faktor seperti staf yang kurang terlatih dan terlalu banyak pekerjaan, informasi yang tidak memadai dan sumber-sumber keuangan atau hambatan-hambatan waktu yang tidak memungkinkan.

Implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Selanjutnya David L. Weimer dan Aidan R. Vinning (1999) dalam Subarsono (2008:103), mengemukakan bahwa salah satu keberhasilan implementasi suatu program dipengaruhi oleh Kemampuan implementor kebijakan yakni menyangkut tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan. hal ini dipertegas oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2008 : 105) bahwa implementasi sebuah kebijakan dipengaruhi oleh tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

4. Kondisi lingkungan yakni berhubungan dengan kondisi-kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal yang mendukung atau menghambat implementasi suatu program, meliputi : tipe sistem politik; struktur pembuatan kebijakan; karakteristik struktur politik local; kendala sumberdaya; sosio cultural; tingkat kepatuhan kelompok sasaran; tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.

Hal ini dipertegas oleh Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2008 : 94) bahwa lingkungan implementasi merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang mencakup : a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Sedangkan Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005 : 99) menegaskan bahwa Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu juga David L. Weimer dan Aidan R.Vinning (1999) dalam Subarsono (2008 :103) mengatakan bahwa lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Menurut George C. Edward dalam Winarno,2008 : 174, bahwa studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration*- dan *public policy*, Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik, sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan tersebut.

2. Alokasi Dana Desa

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa, dengan uraian sebagai berikut:

1. Perencanaan yaitu kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan Desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APB Desa.
2. Pelaksanaan yaitu rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan APB Desa. Kegiatan pelaksanaan ini dibagi menjadi dua yaitu 1) kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang, 2) pelaksanaan kegiatan dilapangan. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa adalah:
 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.
 - b. Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
 - c. Pengeluaran keuangan Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan keuangan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan Desa
 - d. Penatausahaan yaitu pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.
 - e. Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa , sebagaimana ditegaskan dalam (asas akuntabel). Dengan ini pelaporan keuangan Desa

menjadi kewajiban pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dan fungsi daripada pelaporan adalah sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya), terkait pelaksanaan kegiatan.

Prinsip yang diperhatikan dalam pelaporan ini adalah:

1. Menyajikan informasi data yang valid, akurat dan terkini,
2. Sistematis (mengikuti kerangka pikir logis)
3. Ringkas dan jelas
4. Tepat waktu sesuai kerangka waktu yang telah ditetapkan

Pertanggungjawaban adalah laporan realisasi pelaksanaan APB Desa yang disampaikan yang disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir di setiap tahun. Dan Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang Desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa;
4. Tertib dan Disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/perubahan APBDesa;
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening Kas Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 Tahun 2016, tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana Desa, tentang penganggaran dan pengalokasian dana Desa yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang didalamnya berbicara tentang indikasi kebutuhan dan rencana pengeluaran dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan dana Desa menjadi dasar penganggaran dana Desa. Tahap penyaluran dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara), ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah), untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke (Rekening Kas Desa) RKD.

B. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1.	Siti Ainun Wida, Djoko Supatmoko dan Taufik Kurohman	Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa-desanya Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan, untuk tahap mengawasi belum berjalan dengan baik, karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik karena kurangnya sumberdaya manusia.	E-Journal, Ilmu ekonomi, Unej, 2015
2.	Faizatul Karimah, Chairul Saleh, Ike Wanusmatie	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan Administratif pengelolaan alokasi Dana Desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan secara maksimal	E –Jurnal. Ilmu administrasi, Brawijaya Malang, 2016

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel atau suatu informasi ilmiah yang membantu peneliti lain yang ingin menggunakan Variabel yang sama (Singarimbun, 19956 : 46 – 47). Dari informasi tersebut, peneliti akan mengetahui bagaimana caranya pengukuran atas variable itu dapat dilakukan dan dengan demikian peneliti dapat menentukan apakah prosedur pengukuran yang sama akan dilakukan atau diperlukan prosedur yang jelas.

1. Implementasi Program Alokasi Dana Desa

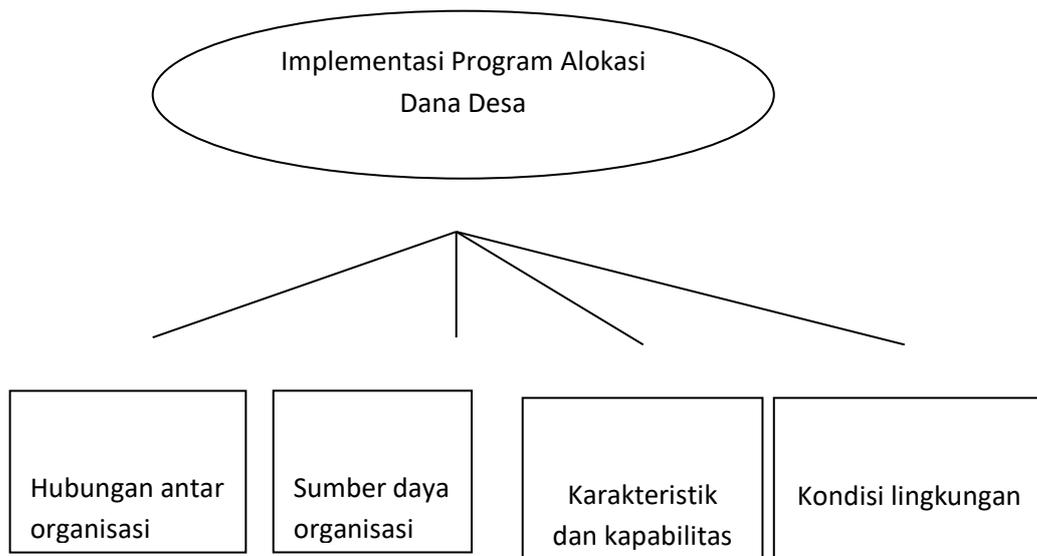
Implementasi program Alokasi Dana Desa adalah proses pelaksanaan atau penerapan program/kebijakan pemerintah mengenai alokasi dana desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung. Adapun indikator – indikator dari variabel ini adalah:

1. Hubungan antar Organisasi adalah menyangkut koordinasi dan hubungan yang baik yang dibangun dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa.
2. Sumberdaya organisasi adalah sumber-sumber berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program Alokasi Dana Desa.
3. Karakteristik dan kapabilitas agen pelaksana adalah kemampuan dan karakter-karakter yang dimiliki oleh pelaksana dalam mengimplementasikan pogram, meliputi : Keterampilan teknis, manajerial petugas; kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol, & mengintegrasikan keputusan; dan komitmen petugas terhadap program.
4. Kondisi lingkungan yakni berhubungan dengan kondisi-kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal yang mendukung atau menghambat implementasi suatu program.

D. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian



Pada gambar Kerangka Konseptual Penelitian di atas dapat diberikan penjelasan bahwa penelitian ini yang menganalisa tentang implementasi program digunakan indikator, yakni : hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, karakteristik dan kapabilitas agen pelaksana dan kondisi lingkungan.

BAB III

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Kampung Air Garam Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang akan dicapai dalam penelitian ini kurang lebih selama 2 bulan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif. Sedangkan menurut **Sugiyono (2008 : 11)** penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain, sehingga jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif Kuantitatif.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut **Sugiyono (2008 : 90)** populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.

Populasi adalah keseluruhan elemen yang hendak dijelaskan dalam penelitian baik berupa manusia, wilayah, sistim dan sebagainya. Dengan

demikian populasi merupakan jumlah keseluruhan obyek yang akan diteliti, maka yang menjadi populasi pada penelitian adalah masyarakat Kampung Air Garam Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya yang berjumlah 63 KK.

2. Sampel

Sampel bersifat *representative* apabila terdiri dari unsur-unsur yang memiliki seluruh sifat-sifat populasi, dengan demikian hasil penelitian terhadap sampel yang representatif tidak akan berbeda dengan hasil penelitian seandainya dilakukan terhadap seluruh populasi.

Menurut **Sugiyono (2008 : 91)**, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan sampel hendaknya memperhitungkan berbagai aspek karena kesimpulan dari hasil penelitian yang dipelajari melalui sampel harus dapat diberlakukan pula untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil harus representatif, sehingga betul - betul mewakili keseluruhan populasi.

Penentuan sampel masyarakat yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling yakni masyarakat yang memahami tentang pelaksanaan program Alokasi dana Desa di Kampung Air Garam sebanyak 15 orang antara lain:

1. Kepala Kampung = 1 Orang
2. Sekretaris kampung = 1 orang
3. Kepala Urusan = 4 orang
4. Ketua BMK = 1 orang
5. Wakil Ketua BMK = 1 orang
6. Tokoh masyarakat = 4 orang
7. Tokoh Pemuda = 2 orang
8. Tokoh Perempuan = 1 orang

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau daftar pertanyaan yang bersifat tertutup di mana pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga responden dibatasi dalam memberikan jawaban melalui beberapa alternatif saja dengan menggunakan skala likerts dan sebagai alternatif pilihan jawaban sebagai berikut :

- A. Sangat baik = 4
- B. Baik = 3
- C. Kurang baik = 2
- D. Tidak baik = 1

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari atau mengkaji permasalahan melalui buku-buku, dokumen-dokumen, literatur-literatur, atau peraturan-peraturan sebagai pegangan peneliti dalam penentuan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan yang mana data dan informasi ini diperoleh dengan cara :
 - a. Observasi

Sugiyono (2008 : 166) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Atau dapat dikatakan bahwa pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat atau peristiwa, keadaan atau situasi yang sedang terjadi.

b. Kuisisioner

Menurut **Sugiyono (2008 : 162)**, kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Kuisisioner yang digunakan adalah daftar pertanyaan tertutup dimana alternatif jawaban sudah ditentukan seluruhnya terlebih dahulu yang berbentuk skala sikap dengan menggunakan tiga alternatif jawaban.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji proporsi atau persentase (%), seperti yang dikemukakan oleh **Azwar, (2007 : 126)** bahwa penyajian persentase dan proporsi memberikan gambaran mengenai distribusi subjek menurut kategori-kategori nilai variabel.

Dalam menganalisa data merupakan suatu proses dimana data itu disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (**Singarimbun dan Effendi,1989 :123**).

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan perhitungan skor.

$$\text{Jumlah skor maksimum} = 4 \times 15 = 60$$

$$\text{jumlah skor minimum} = 1 \times 15 = 15$$

Tabel interpretasi skor sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Interpretasi Skor

NO.	Interval Jumlah Skor	Predikat
1	$45 < \text{jumlah skor} \leq 60$	Baik
2	$30 < \text{jumlah skor} \leq 45$	Cukup Baik

3	$15 < \text{jumlah skor} \leq 30$	Tidak Baik
4	$1 < \text{jumlah skor} \leq 15$	Sangat Tidak Baik

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Objek Penelitian

Pemerintahan Kampung Air Garam dipimpin oleh kepala Kampung yang berada di wilayah Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 20 Tahun 2009. Susunan organisasi pemerintahan Kampung Air Garam Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2005 yakni :

a. Kepala Kampung

Dalam pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi kepala Kampung antara lain :

- 1) Memimpin penyelenggara pemerintah kampung
- 2) Membina kehidupan masyarakat kampung
- 3) Membina perekonomian kampung
- 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung
- 5) Mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung
- 6) Mewakili kampungnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukumnya.

Dalam pelaksanaan tugas kepala kampung dibantu oleh sekretaris kampung.

b. Sekretaris Kampung

Tugas dan Fungsi Sekretaris Kampung meliputi:

- a) Menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kampung dan memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Kampung. Sedangkan Fungsi

Sekretaris kampung adalah :

- a) Melaksanakan urusan surat-menyurat
- b) Kearsipan dan laporan
- c) Melaksanakan urusan administrasi pemerintahan
- d) Melaksanakan tugas dan fungsi dari Kepala kampung apabila Kepala Kampung berhalangan melakukan tugasnya.

c. Kepala Urusan pemerintahan

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan meliputi :

1. Mengisi buku keputusan Pemerintahan kampung
2. Mengisi buku kekayaan dan inventaris kampung(buku data tanah di Kampung)
3. Mengisi buku administrasi penduduk (buku data kependudukan) yang terdiri dari : data induk penduduk dan data rekapitulasi akhir bulan
4. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya.

d. Kepala Urusan Umum

Kedudukan kepala urusan umum adalah sebagai unsur pembantu sekretaris Kampung dalam bidang tugasnya. Fungsi Kepala Urusan adalah kegiatan sesuai bidang tugas dan pelayanan administrasi terhadap Kepala kampung. Tugas Kepala Urusan Umum adalah membantu Sekretaris dan kepala urusan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kampung. Sedangkan fungsi Kepala Urusan Umum meliputi :

- 1) Mengisi buku kekayaan dan inventaris kampung
- 2) Mengisi buku agenda surat masuk dan surat keluar
- 3) Mengisi buku administrasi keuangan kampung
- 4) Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan

e. Kepala Urusan Pembangunan

Tugas Kepala Urusan Pembangunan meliputi :

- 1) Melaksanakan administrasi pembangunan
- 2) Memcatat dan mempersiapkan bahan guna pembuatan usulan rencana proyek
- 3) Mengadakan pelayanan dan pencatatan dalam hal pembuatan permohonan ijin usaha bangunan dan lain-lain.

f. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Tugas Urusan Kesejahteraan Rakyat meliputi :

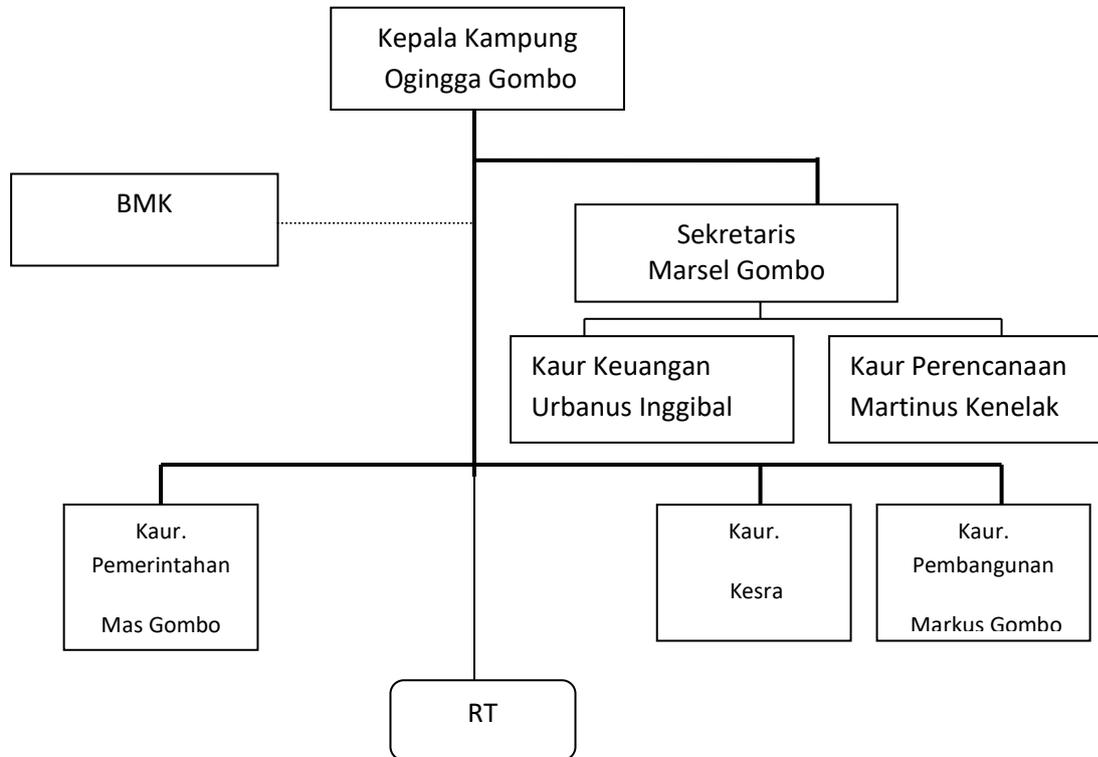
- 1) Melaksanakan pencatatan surat dan keadaan kesejahteraan rakyat
 - 2) Mengikuti perkembangan serta melaporkan tentang keadaan kesehatan masyarakat dan PKK, mengikuti perkembangan serta melaporkan tentang keadaan kesehatan masyarakat dan PKK
- a) Menerbitkan surat menyurat keterangan lainnya misalnya seperti: Kematian, Surat keterangan minta sumbangan untuk kerja bakti dan ronda malam.

Susunan organisasi Pemerintahan Kampung Air Garam Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya digambarkan dalam struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 4.1.

Struktur Organisasi Kampung Air Garam

Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya



Sumber : Kantor Kampung Air Garam Tahun 2020

2. Keadaan BMK

Dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan kampung selalu berkoordinasi dengan Badan Musyawarah kampung antara lain:

Ketua BMK adalah Lukas Kenelak

Sekertaris BMK adalah Alpianus Kenelak\

Anggota-Anggota :

1. Fany Kenelak

2. Gbaldek Kenelak

3. Daga kigidek Kenelak

5. Pataldek Kenelak

6. Wule Kenelak

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung Air Garam dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penetapan Dana Kampung Alokasi Dana Kampung, bagi Hasil Pajak dan retribusi Kampung Air Garam Distrik Bugi Kabupaten Jayawijya Tahu Anggaran 2019 sebesar 938.250.949 dengan rincian pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Dana Kampung (Rp)	Alokasi Dana Kampung	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi(Rp)	Jumlah(Rp)
725.936.000	203.320.547	8.994.400	938.250.947

Dalam pelaksanaan dana kampung untuk pemberdayaan masyarakat digunakan tabel 4.2.sebagai berikut :

No.	Bidang/Kegiatan	ADK	APBK	Jumlah(Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	281.600.000		281.600.000
2	Bidang Pembangunan Desa		462.769.00	462.769.000
3	Bidang Pembinaan masyarakat		200.000.000	20.000.000

4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		173.881.947	173.881.947
	Jumlah			938.250.947

3. Keadaan Responden

Jumlah responden sebanyak 15 orang, dapat dilihat dari jumlah, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat umur, dan masa kerja sebagai berikut:

a. Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keadaan Responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3.

Keadaan Responden

Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	9	60,00
2	Perempuan	6	40,00
JUMLAH		15	100

Sumber : Olahan dari Kuesioner **Tahun 2020**

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa keadaan jenis kelamin responden, sebanyak 9 orang atau 60,00% berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 6 orang atau 40,00%.

b. Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Keadaan responden berdasarkan tingkat umur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4.

Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1	20 - 30	4	26,67
2	31 - 40	6	40,00
3	41 -50	5	33,33
JUMLAH		15	100

Sumber : Olahan dari Kuesioner *Tahun 2020*

Dari data tabel 4.4 menunjukkan bahwa umur responden meliputi 20-30 sebanyak 4 orang atau 26,67%, yang berumur antara 31-40 sebanyak 6 orang atau 40,00% dan yang berumur antara 41-50 sebanyak 5 orang atau 33,33%.

c. Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keadaan Responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5.

Keadaan Responden

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	3	20,00
2	SLTP	4	26,67

3	SLTA	8	53,33
JUMLAH		15	100

Sumber : Olahan dari Kuesioner. *Tahun 2020*

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden yang tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 3 orang atau 20,00%, yang SLTP sebanyak 4 orang atau 26,67% dan yang SLTA sebanyak 8 orang atau 53,33%.

d. Keadaan Responden Berdasarkan Masa Kerja.

Keadaan Responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6.

Keadaan Responden Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja (Tahun)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	1 - 10	6	40,00
2	11 - 20	9	60,00
Jumlah		15	100

Sumber: Olahan dari Kuesioner *Tahun 2020*

Berdasarkan tabel 4.6. di atas, menunjukkan bahwa keadaan masa kerja Responden pada masa kerja 1 - 10 tahun sebanyak 6 orang atau 40,00% dan responden yang memiliki masa kerja 11 – 20 tahun sebanyak 9 orang atau 60,00%.

3. Analisa Data

a. Implementasi Program Alokasi Dana Desa

Dalam menganalisa **Implementasi Program Alokasi Dana Desa** dengan indikator sebagai berikut:

1. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan Antar Organisasi dapat dianalisa dengan sub indikator sebagai berikut:

- a. Tanggapan Responden tentang Koordinasi Kepala Kampung dengan Aparat Kampung dalam pelaksanaan program Alokasi dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7

Tanggapan Responden tentang Koordinasi Kepala Kampung
dengan Aparat Kampung dalam pelaksanaan
program Alokasi dana Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor x frekuensi
Sangat baik	4	3	12
Baik	3	6	18
Kurang baik	2	4	8
Tidak Baik	1	2	2
Jumlah		15	40

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor adalah 12, yang menjawab baik sebanyak 6 orang dengan nilai skor adalah 18, yang menjawab kurang baik sebanyak 4 orang dengan nilai skor adalah 8 dan yang menjawab tidak baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor adalah 2. Dan hasil skor tentang Koordinasi Kepala Kampung dengan Aparat Kampung dalam pelaksanaan

program Alokasi dana Desa sebesar 40 ($30 < \text{jumlah skor} \leq 45$) dan masuk kategori cukup baik.

b. Tanggapan Responden tentang Koordinasi Kepala Kampung dengan Distrik dalam pelaksanaan program Alokasi dana desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8

Tanggapan Responden tentang Koordinasi Kepala Kampung dengan Distrik dalam pelaksanaan program Alokasi dana desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor x frekuensi
Sangat baik	4	4	16
Baik	3	4	12
Kurang baik	2	6	12
Tidak Baik	1	1	1
Jumlah		15	41

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik sebanyak 4 orang dengan nilai skor adalah 16, yang menjawab baik sebanyak 4 orang dengan nilai skor adalah 12, yang menjawab kurang baik sebanyak 6 orang dengan nilai skor adalah 12 dan yang menjawab tidak baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor adalah 1. Dan hasil skor tentang Koordinasi Kepala Kampung dengan Distrik dalam pelaksanaan program Alokasi dana desa sebesar 41 ($30 < \text{jumlah skor} \leq 45$) dan masuk kategori cukup baik.

c. Tanggapan Responden tentang Koordinasi antara Aparat Kampung dalam pelaksanaan Program Alokasi dana desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9

Tanggapan Responden tentang Koordinasi antara
Aparat Kampung dalam pelaksanaan
Program Alokasi dana desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor x frekuensi
Sangat baik	4	1	4
Baik	3	7	21
Kurang baik	2	6	12
Tidak Baik	1	1	1
Jumlah		15	38

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor adalah 4, yang menjawab baik sebanyak 7 orang dengan nilai skor adalah 21, yang menjawab kurang baik sebanyak 6 orang dengan nilai skor adalah 12 dan yang menjawab tidak baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor adalah 1. Dan hasil skor tentang Koordinasi antara Aparat Kampung dalam pelaksanaan Program Alokasi dana desa sebesar 38 ($30 < \text{jumlah skor} \leq 45$) dan masuk kategori cukup baik.

d. Tanggapan Responden tentang Koordinasi antara kepala kampung dengan BMK dalam pelaksanaan Program Alokasi dana desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10

Tanggapan Responden tentang Koordinasi antara kepala kampung dengan BMK dalam pelaksanaan Program Alokasi dana desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor x frekuensi
Sangat baik	4	3	12
Baik	3	5	15
Kurang baik	2	5	10
Tidak Baik	1	2	2
Jumlah		15	39

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor adalah 12, yang menjawab baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor adalah 15, yang menjawab kurang baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor adalah 10 dan yang menjawab tidak baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor adalah 2. Dan hasil skor tentang pegawai mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sebesar 39 ($30 < \text{jumlah skor} \leq 45$) dan masuk kategori cukup baik.

- e. Tanggapan Responden tentang Hubungan yang baik antar kepala kampung dengan aparat kampung dalam pelaksanaan Program Alokasi dana desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11

Tanggapan Responden tentang Hubungan yang baik antar kepala kampung dengan aparat kampung dalam pelaksanaan Program Alokasi dana desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor x frekuensi
Sangat baik	4	5	20
Baik	3	7	21
Kurang baik	2	2	2
Tidak Baik	1	1	1
Jumlah		15	44

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor adalah 20, yang menjawab baik sebanyak 7 orang dengan nilai skor adalah 21, yang menjawab kurang baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor adalah 2 dan yang menjawab tidak baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor adalah 1. Dan hasil skor tentang Hubungan yang baik antar kepala kampung dengan aparat kampung dalam pelaksanaan Program Alokasi dana desa sebesar 44 ($30 < \text{jumlah skor} \leq 45$) dan masuk kategori cukup baik.

2. Sumber daya

Hubungan Antar Organisasi dapat dianalisa dengan sub indikator sebagai berikut:

- a. Tanggapan Responden tentang Ketersediaan informasi dalam pelaksanaan program Alokasi dana desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12

Tanggapan Responden tentang Ketersediaan informasi dalam pelaksanaan program Alokasi dana desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor x frekuensi
Sangat baik	4	1	4
Baik	3	3	9
Kurang baik	2	6	12
Tidak Baik	1	5	5
Jumlah		15	30

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor adalah 4, yang menjawab baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor adalah 9, yang menjawab kurang baik sebanyak 6 orang dengan nilai skor adalah 12 dan yang menjawab tidak baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor adalah 5. Dan hasil skor tentang Ketersediaan informasi dalam pelaksanaan program Alokasi dana desa sebesar 30 ($15 < \text{jumlah skor} \leq 30$) dan masuk kategori tidak baik.

b. Tanggapan Responden tentang Ketersediaan fasilitas pendukung kerja dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13

Tanggapan Responden tentang Ketersediaan fasilitas pendukung kerja dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor x frekuensi
Sangat baik	4	0	0
Baik	3	5	15
Kurang baik	2	7	14
Tidak Baik	1	3	3
Jumlah		15	32

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik tidak ada, yang menjawab baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor adalah 15, yang menjawab kurang baik sebanyak 7 orang dengan nilai skor adalah 14 dan yang menjawab tidak baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor adalah 3. Dan hasil skor tentang Ketersediaan fasilitas pendukung kerja dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa sebesar 32 ($30 < \text{jumlah skor} \leq 45$) dan masuk kategori cukup baik.

- c. Tanggapan Responden tentang Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14

Tanggapan Responden tentang Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor x frekuensi
Sangat baik	4	5	20
Baik	3	7	21
Kurang baik	2	3	6
Tidak Baik	1	0	0
Jumlah		15	47

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor ada;ah 20, yang menjawab baik sebanyak 7 orang dengan nilai skor adalah 21, yang menjawab kurang baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor adalah 6 dan yang menjawab tidak baik tidak ada. Dan hasil skor tentang Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa sebesar 47 ($45 < \text{jumlah skor} \leq 60$) dan masuk kategori baik.

3. Karakteristik Dan Kapabilitas Agen Pelaksana

Hubungan Antar Organisasi dapat dianalisa dengan sub indikator sebagai berikut:

- a. Tanggapan Responden tentang Komitmen Aparat Kampung dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15

Tanggapan Responden tentang Komitmen
Aparat Kampung dalam pelaksanaan
program Alokasi Dana Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor x frekuensi
Sangat baik	4	4	16
Baik	3	7	21
Kurang baik	2	2	4
Tidak Baik	1	2	2
Jumlah		15	43

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik sebanyak 4 dengan nilai skor adalah 16, yang menjawab baik sebanyak 7 orang dengan nilai skor adalah 21, yang menjawab kurang baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor adalah 4 dan yang menjawab tidak baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor adalah 2. Dan hasil skor tentang Komitmen Aparat Kampung dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa sebesar 43 ($30 < \text{jumlah skor} \leq 45$) dan masuk kategori cukup baik.

b. Tanggapan Responden tentang Tanggungjawab Aparat Kampung dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.16

Tanggapan Responden tentang Tanggungjawab
Aparat Kampung dalam pelaksanaan \
program Alokasi Dana Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor x frekuensi
Sangat baik	4	1	4
Baik	3	6	18
Kurang baik	2	5	10
Tidak Baik	1	3	3
Jumlah		15	35

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor adalah 4, yang menjawab baik sebanyak 6 orang dengan nilai skor adalah 18, yang menjawab kurang baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor adalah 10 dan yang menjawab tidak baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor adalah 3. Dan hasil skor tentang Tanggungjawab Aparat Kampung dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa sebesar 35 ($30 < \text{jumlah skor} \leq 45$) dan masuk kategori cukup baik.

- c. Tanggapan Responden tentang Keadilan pemerintah kampung dalam kegiatan Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.17

Tanggapan Responden tentang Keadilan pemerintah kampung dalam kegiatan Alokasi Dana Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor x frekuensi
Sangat baik	4	3	12
Baik	3	3	9
Kurang baik	2	6	12
Tidak Baik	1	3	3
Jumlah		15	36

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor adalah 12, yang menjawab baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor adalah 9, yang menjawab kurang baik sebanyak 6 orang dengan nilai skor adalah 12 dan yang menjawab tidak baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor adalah 3. Dan hasil skor tentang Keadilan pemerintah kampung dalam kegiatan Alokasi Dana Desa sebesar 36 ($30 < \text{jumlah skor} \leq 45$) dan masuk kategori cukup baik.

d. Tanggapan Responden tentang Keterbukaan pemerintah kampung dalam kegiatan Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.18

Tanggapan Responden tentang Keterbukaan pemerintah kampung dalam kegiatan Alokasi Dana Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor x frekuensi
Sangat baik	4	0	0
Baik	3	5	15
Kurang baik	2	6	12
Tidak Baik	1	4	4
Jumlah		15	31

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik tidak ada, yang menjawab baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor adalah 15, yang menjawab kurang baik sebanyak 6 orang dengan nilai skor adalah 12 dan yang menjawab tidak baik sebanyak 4 orang dengan nilai skor adalah 4. Dan hasil skor tentang Keterbukaan pemerintah kampung dalam kegiatan Alokasi Dana Desa sebesar 31 ($31 < \text{jumlah skor} \leq 45$) dan masuk kategori cukup baik.

- e. Tanggapan Responden tentang Kemampuan pemerintah kampung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.19

Tanggapan Responden tentang Kemampuan pemerintah kampung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor x frekuensi
Sangat baik	4	2	8
Baik	3	5	15
Kurang baik	2	4	8
Tidak Baik	1	4	4
Jumlah		15	35

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor adalah 8, yang menjawab baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor adalah 15, yang menjawab kurang baik sebanyak 4 orang dengan nilai skor adalah 8 dan yang menjawab tidak baik sebanyak 4 orang dengan nilai skor adalah 4. Dan hasil skor tentang Kemampuan pemerintah kampung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sebesar 35 ($30 < \text{jumlah skor} \leq 45$) dan masuk kategori cukup baik.

f. Tanggapan Responden tentang Kemampuan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.20

Tanggapan Responden tentang Kemampuan
pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor x frekuensi
Sangat baik	4	3	12
Baik	3	4	12
Kurang baik	2	5	10
Tidak Baik	1	3	3
Jumlah		15	37

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor adalah 12, yang menjawab baik sebanyak 4 orang dengan nilai skor adalah 12, yang menjawab kurang baik sebanyak 5 orang dengan nilai skor adalah 10 dan yang menjawab tidak baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor adalah 3. Dan hasil skor tentang pegawai mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sebesar 37 ($30 < \text{jumlah skor} \leq 45$) dan masuk kategori cukup baik.

4. Kondisi Lingkungan

Hubungan Antar Organisasi dapat dianalisa dengan sub indikator sebagai berikut:

- a. Tanggapan Responden tentang Peraturan Kampung mendukung dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.21

Tanggapan Responden tentang Peraturan Kampung mendukung dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor x frekuensi
Sangat baik	4	7	28
Baik	3	6	18
Kurang baik	2	2	4
Tidak Baik	1	0	0
Jumlah		15	50

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik sebanyak 7 orang dengan nilai skor adalah 28, yang menjawab baik sebanyak 6 orang dengan nilai skor adalah 18, yang menjawab kurang baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor adalah 4 dan yang menjawab tidak baik tidak ada. Dan hasil skor tentang Peraturan Kampung mendukung dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa sebesar 50 ($45 < \text{jumlah skor} \leq 60$) dan masuk kategori baik.

b. Tanggapan Responden tentang Masyarakat Kampung mendukung dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.22

Tanggapan Responden tentang Masyarakat Kampung mendukung dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor x frekuensi
Sangat baik	4	6	24
Baik	3	6	18
Kurang baik	2	3	6
Tidak Baik	1	0	0
Jumlah		15	48

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik sebanyak 6 orang dengan nilai skor adalah 24, yang menjawab baik sebanyak 6 orang dengan nilai skor adalah 18, yang menjawab kurang baik sebanyak 3 orang dengan nilai skor adalah 6 dan yang menjawab tidak baik tidak ada. Dan hasil skor tentang Masyarakat Kampung mendukung dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa sebesar 48 ($45 < \text{jumlah skor} \leq 60$) dan masuk kategori baik.

- c. Tanggapan Responden tentang Masyarakat Kampung patuh dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.23

Tanggapan Responden tentang Masyarakat Kampung patuh dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Skor x frekuensi
Sangat baik	4	2	8
Baik	3	8	24
Kurang baik	2	4	8
Tidak Baik	1	1	1
Jumlah		15	41

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik sebanyak 2 orang dengan nilai skor adalah 8, yang menjawab baik sebanyak 8 orang dengan nilai skor adalah 24, yang menjawab kurang baik sebanyak 4 orang dengan nilai skor adalah 8 dan yang menjawab tidak baik sebanyak 1 orang dengan nilai skor adalah 1. Dan hasil skor tentang Masyarakat Kampung patuh dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa sebesar 41 ($30 < \text{jumlah skor} \leq 45$) dan masuk kategori cukup baik.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisa data maka selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai implementasi Program Dana Desa yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hubungan Antara Organisasi

Indikator Hubungan Antara Organisasi dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 4.24.**Rata-rata Indikator Hubungan Antara Organisasi**

No.	Pernyataan	Rata-rata Skor	Predikat
1	Koordinasi Kepala Kampung dengan Aparat Kampung dalam pelaksanaan program Alokasi dana Desa	40	Cukup Baik
2	Koordinasi Kepala Kampung dengan Distrik dalam pelaksanaan program Alokasi dana desa	41	Cukup Baik
3	Koordinasi antara Aparat Kampung dalam pelaksanaan Program Alokasi dana desa	38	Cukup Baik
4	Koordinasi antara kepala kampung dengan BMK dalam pelaksanaan Program Alokasi dana desa	39	Cukup Baik
5	Hubungan yang baik antar kepala kampung dengan aparat kampung dalam pelaksanaan Program Alokasi dana desa	44	Cukup Baik
	Rata-rata skor	40,4	Cukup Baik

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa skor indikator Hubungan Antara Organisasi adalah 40,4 bahwa indikator Hubungan Antara Organisasi masuk dalam kategori cukup baik.

2. Sumber Daya

Indikator sumber daya dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 4.25.

Rata-rata Indikator sumber daya

No.	Pernyataan	Rata-rata Skor	Predikat
1	Ketersediaan informasi dalam pelaksanaan program Alokasi dana desa	30	Kurang baik
2	Ketersediaan fasilitas pendukung kerja dalam pelaksanaan program	32	Cukup baik
3	Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa	47	Baik
	Rata-rata skor	36,33	Cukup baik

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa skor indikator sumber daya adalah 36,33 bahwa indikator sumber daya dalam kategori cukup baik.

3. Karakteristik dan kapabilitas Pelaksana

Indikator karakteristik dan kapabilitas pelaksana dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 4.26.

Rata-rata Indikator karakteristik dan kapabilitas pelaksana

No.	Pernyataan	Rata-rata Skor	predikat
1	Komitmen Aparat Kampung dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa	43	Cukup Baik
2	Tanggungjawab Aparat Kampung dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa	35	Cukup baik
3	Keadilan pemerintah kampung dalam kegiatan Alokasi Dana Desa	36	Cukup baik
4	Keterbukaan pemerintah kampung dalam kegiatan Alokasi Dana Desa	31	Cukup baik
5	Kemampuan pemerintah kampung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa	35	Cukup baik
6	Kemampuan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	37	Cukup baik
	Rata-rata skor	36,17	Cukup baik

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa skor indikator karakteristik dan kapabilitas pelaksana adalah 36,17 bahwa indikator karakteristik dan kapabilitas pelaksana masuk dalam kategori cukup baik.

4. Kondisi Lingkungan

Indikator kondisi lingkungan dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 4.27.

Rata-rata Indikator kondisi lingkungan

No.	Pernyataan	Rata-rata Skor	Predikat
1	Peraturan Kampung mendukung pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dalam	50	Baik
2	Masyarakat Kampung mendukung pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dalam	48	Baik
3	Masyarakat Kampung patuh dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa	41	Cukup Baik
	Rata-rata skor	46,33	Baik

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa skor indikator kondisi lingkungan adalah 46,33 bahwa indikator kondisi lingkungan dalam kategori baik.

d. Rata-rata Skor variabel Implementasi Program Alokasi dana Desa

Rata-rata indikator dari implementasi Program Dana Desa dijelaskan berikut.

Tabel 4.28.

Rata-rata indikator dari Variabel Implementasi

Program Alokasi dana Desa

No	Indikator	Rata-rata Skor	Predikat
1	Hubungan Antara Organisasi	40,4	Cukup baik
2	Karakteristik dan kapabilitas Pelaksana	36,33	Cukup baik
3	Sumberdaya	36,17	Cukup baik
4	Kondisi Lingkungan	46,33	Baik
	Rata-rata skor	39,81	Cukup baik

Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata skor variabel Implementasi Program Alokasi dana Desa di kampung Air Garam Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya adalah 39,81. Dengan demikian Implementasi Program Alokasi dana Desa di kampung Air Garam Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya masuk kategori cukup baik. Indikator hubungan antara organisasi sebesar 40,4 dan dikategori cukup baik. indikator karakteristik dan kapabilitas pelaksana sebesar 36,33 dan dikategorikan cukup baik, indikator sumber daya 36,17 dikategorikan cukup baik, indikator kondisi lingkungan sebesar 46,33 dan dikategorikakan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Hasil penelitian dari analisa data menyimpulkan bahwa rata-rata skor variabel Implementasi Program Alokasi dana Desa di kampung Air Garam Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya adalah 39,81. Dengan demikian Implementasi Program Alokasi dana Desa di kampung Air Garam Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya masuk kategori cukup baik. Indikator hubungan antara organisasi sebesar 40,4 dan dikategori cukup baik. indikator karakteristik dan kapabilitas pelaksana sebesar 36,33 dan dikategorikan cukup baik, indikator sumber daya 36,17 dikategorikan cukup baik, indikator kondisi lingkungan sebesar 46,33 dan dikategorikakan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka yang dapat peneliti sarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan hubungan kerja antar kepala kampung, aparat kampung dan distrik dalam pengelolaan dana kampung
2. Perlu adanya peningkatan kapabilitas pelaksana pengelolaan dana kampung yaiyu dibutuhkan sikap terbuka dan adil dalam pengelolaan dana kampung
3. Perlu adanya perbaikan sumber daya, baik sumberdaya manusia dan sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan dana kampung.

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.

Kepada

Yth. Bapak/Ibu

Pada masyarakat Kampung Air Garam Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya.

Dengan Hormat,

Di tengah kesibukan Bapak/Ibu melaksanakan tugas, perkenankanlah saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan sedikit waktu guna mengisi angket yang saya sertakan ini.

Angket ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah, oleh karena itu jawaban yang Bapak/Ibu berikan sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu. Angket ini tidak ada hubungannya dengan status dan kedudukan Bapak/Ibu di tempat kerja, maka jawaban yang benar adalah jawaban yang benar-benar menggambarkan keadaan Bapak/Ibu.

Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan yang telah Bapak/Ibu berikan. Besar harapan saya untuk menerima kembali angket ini dalam waktu singkat.

PETUNJUK PENGISIAN

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan yang ada pada angket ini sesuai keadaan, pendapat, perasaan Bapak/Ibu, bukan berdasarkan pendapat umum atau pendapat orang lain.

Pernyataan-pernyataan dalam angket ini mempunyai 4 (empat) alternatif jawaban. Mohon diberi silang pada salah satu alternatif jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling sesuai.

IDENTITAS RESPONDEN :

Nama Responden :

Jenis Kelamin :

Umur : (tahun)

Masa Kerja :

Pendidikan Terakhir :

PERTANYAAN :

1. Implementasi Program Alokasi Dana Desa

a. Hubungan Antara Organisasi

1. Koordinasi Kepala Kampung dengan Aparat Kampung dalam pelaksanaan program Alokasi dana Desa
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
2. Koordinasi Kepala Kampung dengan Distrik dalam pelaksanaan program Alokasi dana desa
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
3. Koordinasi antara Aparat Kampung dalam pelaksanaan Program Alokasi dana desa
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
4. Koordinasi antara kepala kampung dengan BMK dalam pelaksanaan Program Alokasi dana desa
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
5. Hubungan yang baik antar kepala kampung dengan aparat kampung dalam pelaksanaan Program Alokasi dana desa
 - a. Sangat baik
 - b. Baik

- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

b. Sumberdaya

6. Ketersediaan informasi dalam pelaksanaan program Alokasi dana desa
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
7. Ketersediaan fasilitas pendukung kerja dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak Baik
8. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik

c. Karakteristik dan kapabilitas Pelaksana

9. Komitmen Aparat Kampung dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
10. Tanggungjawab Aparat Kampung dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
11. Keadilan pemerintah kampung dalam kegiatan Alokasi Dana Desa
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
12. Keterbukaan pemerintah kampung dalam kegiatan Alokasi Dana Desa
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
13. Kemampuan pemerintah kampung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa
 - a. Sangat baik

- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

14. Kemampuan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

d. Kondisi Lingkungan

15. Peraturan Kampung mendukung dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

16. Masyarakat Kampung mendukung dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

17. Masyarakat Kampung patuh dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

-----*Terima kasih Atas Partisipasinya* -----

Lampiran 2. Data Hasil Penelitian

**DATA HASIL PENELITIAN
VARIABEL PELAKSANAAN PROGRAM**

INDIKATOR : KOMUNIKASI

NO. RES	PERTANYAAN NOMOR ITEM											
	1				2				3			
	a	b	C	d	a	b	c	D	a	B	C	D
1		√						√		√		
2			√					√				√
3			√					√				√
4		√					√					√
5		√					√		√			
6		√					√				√	
7		√						√			√	
8			√					√			√	
9			√					√			√	
10			√				√				√	
11			√				√		√			
12			√					√				√
13		√					√					√
14		√					√					√
15			√				√					√
16		√						√				√
17		√						√	√			
18		√						√				√
19		√						√				√
20			√				√					√
21		√					√				√	
22		√					√					√
23		√					√					√
24		√					√					√
25		√						√			√	
26			√					√			√	
27			√					√				√
28			√				√					√
29			√				√					√
30			√				√				√	
31		√					√				√	
32		√					√				√	
33		√					√				√	
34		√					√				√	
35		√					√					√

36			√				√					√
37		√					√					√
38		√					√				√	
39		√					√				√	
40		√					√				√	
41			√				√				√	
42			√				√				√	
43			√				√			√		
44			√				√					√
45			√				√					√
46		√					√					√
47		√						√		√		
48		√					√				√	
49		√						√			√	
50		√						√			√	
JUMLAH	0	30	20	0	0	0	33	17	0	5	25	20

INDIKATOR : SUMBER DAYA

NO. RES	PERTANYAAN NOMOR ITEM											
	1				2				3			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1			√				√				√	
2				√		√						√
3				√		√						√
4			√				√					√
5				√			√				√	
6				√		√					√	
7				√		√					√	
8			√				√				√	
9		√					√				√	
10		√					√					√
11		√				√					√	
12		√				√					√	
13			√				√				√	
14		√					√				√	
15		√					√				√	
16		√					√					√
17			√				√				√	
18			√				√				√	
19			√				√				√	
20			√				√				√	
21			√				√				√	
22			√			√					√	
23		√				√					√	

24		√					√				√	
25		√					√				√	
26		√					√				√	
27		√					√				√	
28		√					√				√	
29				√				√			√	
30				√				√			√	
31				√				√			√	
32		√				√					√	
33		√				√					√	
34		√						√			√	
35		√						√			√	
36				√				√		√		
37				√				√		√		
38				√				√			√	
39		√						√			√	
40		√						√			√	
41		√						√		√		
42		√						√				√
43			√					√		√		
44		√						√		√		
45		√						√				√
46		√					√			√		
47		√						√				√
48		√						√				√
49		√					√					√
50		√					√			√		
JUMLAH	0	28	11	11	0	10	23	17	0	7	33	10

INDIKATOR : DISPOSISI/SIKAP PELAKSANA

NO. RES	PERTANYAAN NOMOR ITEM											
	1				2				3			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1			√				√				√	
2				√		√						√
3				√		√						√
4			√				√					√
5				√			√				√	
6				√			√				√	
7				√		√					√	
8			√				√				√	
9			√				√				√	
10			√				√					√
11			√			√					√	

12			√			√				√		
13			√				√			√		
14			√				√			√		
15			√					√			√	
16			√				√					√
17			√				√				√	
18			√				√			√		
19			√				√			√		
20			√				√			√		
21			√				√				√	
22			√			√					√	
23			√				√			√		
24			√				√			√		
25			√				√			√		
26			√				√				√	
27			√				√				√	
28			√				√			√		
29				√				√		√		
30				√				√		√		
31				√				√			√	
32					√	√					√	
33					√		√				√	
34			√					√			√	
35			√				√				√	
36				√			√			√		
37				√			√			√		
38				√				√			√	
39			√				√					√
40			√				√				√	
41			√				√			√		
42		√						√				√
43			√					√		√		
44			√					√		√		
45				√				√				√
46				√			√			√		
47				√				√				√
48		√						√				√
49		√					√					√
50		√					√			√		
JUMLAH	0	4	30	16	0	7	31	12	0	19	20	11

BIODATA PENULIS

Mare Gombo, Lahir di Manda, 05 Juni 1987, dari pasangan Bapak Kelait Gombo dan Ibu Pataldek Kenelak merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Beragama Kristen Protestan. Tamat Sekolah Dasar Inpres Meagaima pada tahun 2000, tamat SMP Negeri Asologaima tahun 2003 dan tamat SMA Negeri Bolakme tahun 2006. Tahun 2016 terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena. Saat ini berdomisili di Kampung Air Garam distrik Bugi.